



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : INSPEKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRISACTI WAHYUNI
2. Jabatan : INSPEKTUR BIDANG ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 72438

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/200 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/54 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.250.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.009.425.279

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 4.666.525.279

III. HUTANG Rp. 90.277.742

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.576.247.537

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.